



Penegak Hukum di Bali Dikumpulkan Terkait Penanganan Korupsi



PELATIHAN BERSAMA-Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (tiga dari kiri), bersama petinggi penegak hukum lainnya saat jumpa pers terkait Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, di Sanur Paradise Hotel, Denpasar, Senin (19/10).

DENPASAR, NusaBali

180 aparat penegak hukum di Bali yaitu polisi, jaksa dan auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) serta BPKP Wilayah Bali mengikuti Pelatihan Bersama Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tipikor di Hotel Sanur Paradise Plaza, Sanur, Denpasar, Senin (19/10).

Acara tersebut langsung dihadiri para pemimpin aparat penegak hukum seperti Ketua Sementara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Taufiequrrahman Ruki, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Anang Iskandar, Jampidsus Keajaung R Widyo Pramono, Kepala

BPKP Ardan Adiprana, Anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardi dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso.

Dalam sambutannya, Ketua Sementara KPK, Taufiequrachman Ruki menyatakan saat ini berkembang isu serapan APBN atau APBD rendah gara-gara takut diperiksa penegak hukum. Namun itu disebut Taufiequrachman omong kosong. "Sangat aneh ketika penegakan hukum digunakan sebagai alasan," terangnya dihadapan 180 peserta pelatihan.

Ia mengatakan, alasan yang mengatakan takut menjalankan

proyek karena takut diperiksa itu merupakan alasan yang tidak masuk akal. Rasa takut itu menurut Ruki karena pikiran kotor dan perbuatan yang dilakukan melanggar. "Itu karena pikiran kotor, dan memang ada niat untuk menguntungkan orang lain dan diri sendiri. Makanya takut menjalankan program," lanjutnya disambut tepuk tangan para peserta.

Ia berharap dalam pelatihan yang digelar untuk seluruh penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan auditor bertujuan sama yaitu untuk pemberantasan korupsi. Ketua KPK yang menggantikan

Abraham Samad ini juga meminta agar antar penegak hukum jangan ada sekat atau ego. "Kalau pelatihan jangan ngumpul polisi sama polisi saja, jaksa dengan jaksa saja atau auditor dengan auditor. "Jangan ada sekat atau ego. Kalau perlu ngobrol dan tukar telpon karena tujuan kita sama," lanjutnya.

Dia juga mengharapkan agar penyelidik, penyidik dan auditor agar menghilangkan urat takutnya dan tidak takut untuk memberantas korupsi. Namun jangan juga memainkan mereka. "Misalnya ada tersangka sampai bertahun-tahun tapi tidak diproses. Kami

belum ada kasus lepas, kecuali pra peradilan (kasus Budi Gunawan) yang membuat kami memantapkan lagi strategi," bebarnya.

Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Ruki sempat ditanya terkait rencana revisi UU KPK. Dengan tegas dia menjawab baginya tidak masalah ada revisi lantaran UU KPK bukan kitab suci. Namun dia mengatakan revisi adalah untuk menguatkan, bukan untuk melemahkan apalagi untuk meniadakan. "Jadi silakan revisi, untuk menguatkan, untuk memperkokoh langkah pemberantasan korupsi. Bukan untuk dilemahkan," tegasnya. **rez**

Edisi : Selasa, 20 Oktober 2015

Hal : 3



Ruko Pemkab Jembrana Dijadikan Tempat Kos

Disewakan Rp 5.000 Per Hari



• NUSABALI/IB DIWANGKARA
RUKO dekat areal Parkir Manuver Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, beralih fungsi jadi tempat kos.

Sejumlah penghuni mengaku secara legal menempati ruko dengan membayar sewa kepada pegawai Kelurahan Gilimanuk.

NEGARA, NusaBali

Fungsi rumah toko (ruko) milik Pemkab Jembrana di dekat areal parkir manuver Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana, disalahgunakan. Bukannya untuk berjualan, malah ruko tersebut dijadikan tempat kos untuk penduduk pendatang (duktang). Mereka dikenakan harga sewa Rp 150 ribu per bulan. Jika tak mampu bayar, cukup

sewa Rp 5 ribu per hari.

Informasi di lapangan, ruko yang dibangun di era kepemimpinan Bupati Jembrana I Gede Winasa itu sudah lama tidak aktif. Sejak dibangun pada tahun 2000-an, puluhan ruko ini sempat diisi para pedagang oleh-oleh khas Bali dari warga setempat. Namun tak berselang lama, para pedagang meninggalkan ruko ini karena dinilai tak strategis. Setelah cukup lama kosong, beberapa ruko telah dihuni sejumlah duktang, mulai dari kalangan buruh bangunan, pedagang, hingga cewek kafe di seputaran Gilimanuk.

Sejumlah penghuni mengaku secara legal menempati ruko tersebut dengan membayar sewa kepada pegawai Kelurahan Gilimanuk. "Bayarnya per bulan Rp 150.000 di luar listrik dan air, biasanya ada petugas dari kelurahan yang memungut," ungkap salah satu penghuni ruko, Rianti, 44, Senin (19/10). Janda asal Madura, Jawa Timur ini, mengaku sudah hampir setahun ngekos di ruko tersebut. Menempati ruko cukup dengan melapor kepada

Edisi : Selasa, 20 Oktober 2015

Hal : 7



HARIAN UMUM
NusaBali

pihak kelurahan dengan menyerahkan KTP dan membayar Rp 150.000 untuk sewa bulan pertama.

"Tiap bulan pegawainya biasanya datang menagih. Kalau tidak punya uang, bisa disewa Rp 5.000 setiap hari. Uangnya ya katanya disetorkan ke kelurahan," ujar penghuni ruko yang juga sebagai pedagang kelontong ini. Secara rinci, mereka mengaku tidak tahu ada berapa ruko yang disediakan. Namun dari puluhan ruko tersebut, sebagian besarnya telah terisi. "Kalau tidak salah ada enam yang masih kosong. Gonta-ganti penghuninya. Kebanyakan memang dipakai tempat tinggal," ujar Dodok, penghuni lainnya.

Lurah Gilimanuk, I Gede Ngurah Widiada, mengakui jika sejumlah ruko telah ditempati sejumlah duktang. Para duktang itu merupakan pedagang di seputaran ruko. Menurutnya, ada 30 ruko yang disediakan, kebanyakan milik pribadi. "Mungkin hanya sekitar 7 ruko saja yang ditempati. Banyak yang tidak

mau, karena memang katanya sepi kalau berdagang di sana," ungkap Widiada.

Mengenai pungutan Rp 150.000 per bulan bagi penghuni, ia mengaku tidak tahu secara pasti. Pengelolaan ruko tersebut, sudah ada surat kuasa dari Pemkab Jembrana kepada kelurahan. "Tapi setahu saya, tidak ada pungutan begitu. Mungkin kalau sekedar untuk kebersihan memang ada. Coba saya akan cek lagi ke staf. Yang jelas secara resmi, kami tidak ada meminta pungutan," ujarnya.

Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, mengatakan keliru jika ruko itu digunakan untuk tempat kos. Apalagi sampai ada pengakuan pungutan sebesar Rp 150.000 per bulan yang dipastikan tidak masuk ke Kas Daerah. Sugiasa perintahkan Lurah Gilimanuk agar melakukan pengecekan dan merapikan areal ruko tersebut. "Kalau untuk jualan ya silakan, karena sesuai. Tapi kalau digunakan tempat kos, sudah salah besar," katanya. **od**

Edisi : Selasa, 20 Oktober 2015

Hal : 7



masalah. Penambahan anggaran itu sudah menjadi kesepakatan eksekutif dan legislatif. Mengenai tambahan itu, ada usulan dan aspirasi dewan. Sehingga akhirnya ada tambahan dana lagi Rp 37 miliar.

"Kami tidak ada bermain. Karena angka inilah yang sudah diteken dalam rapat paripurna. Kami mengakomodir aspirasi dewan," kata Suambara.

Untuk membuktikan omongannya, Suambara bersedia membuka dokumen rapat pembahasan lengkap KUA-PPAS yang dilakukan eksekutif bersama legislatif. "Ada kok dokumennya," tandasnya.

Secara terpisah Kabag Humas dan Protokol Pemkab

Badung sebagai juru bicara penjabat bupati, AA Gede Raka Yuda menambahkan, bahwa KUA dan PPAS merupakan rangkaian dokumen penyusunan RAPBD yang secara substansi menjadi kompetensi dan kewenangan TAPD. "Pak Suambara yang hadir memenuhi undangan Komisi III ini sebelumnya telah mendapatkan petunjuk dan arahan dari Penjabat Bupati agar tidak memberikan penjelasan tentang KUA dan PPAS dan RAPBD karena itu menjadi kompetensi TAPD. Penjabat Bupati menekankan bahwa pak Suambara hanya boleh menjelaskan kegiatan yang ada pada instansinya," kata Raka Yuda. **as**

Edisi : Selera, 20 Oktober 2015

Hal : 2